

Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pembangunan Di Kota Sorong

Nikolas Kaliele¹, Karsiman², Arie Purnomo³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Dari hasil analisis yang dilakukan bahwa Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2011, pajak dan retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %, dan 36,58 %. Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri – Fisipol UGM, maka Derajat Otonomi Fiskal Kota Sorong yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut berada pada kategori “cukup”. Artinya adalah bahwa Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom. Kemampuan rutin daerah Kota Sorong rata-rata sebesar 119,15 %. Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan.

Kata Kunci : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pembangunan

PENDAHULUAN

Memperhatikan berbagai hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah (Hoessein, 2000 :3). Hal ini merupakan gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada Undang-undang tersebut, maka praktek yang terjadi di lapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan kepentingan dan potensi daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2000 : 574).

Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan

Daerah (TPD) masih relatif rendah. Sebagaimana yang dialami Pemerintah Kota Sorong, selama kurun waktu tahun anggaran 2011/2012 – 2013 proporsi PAD terhadap TPD rata-rata sebesar 32,96 %. Proporsi sebesar ini sebenarnya tidaklah terlalu kecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fisipol UGM bekerjasama dengan Badan Litbang Depdagri menunjukkan bahwa selama 5 tahun (2007/2008 – 2012/2013) sebagian besar

Daerah Kabupaten/Kota atau sebanyak 173 Daerah Kabupaten/Kota (59,25%) dari seluruh Indonesia) mempunyai angka prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah di bawah 15%. Salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi adalah dengan melihat besarnya nilai PAD yang dapat dicapai oleh daerah tersebut. Dengan PAD yang relatif kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, tanpa didukung oleh pihak lain (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Propinsi). adalah dalam pelaksanaan otonomi ini, daerah dituntut untuk mampu membiayai dirinya sendiri. Sampai saat ini, berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan pendapatan daerah demi mengembangkan dan meningkatkan penerimaan PAD. Dalam pengelolaan PAD tersebut, pemerintah daerah menetapkan rencana target penerimaan, namun realisasi dari target PAD yang telah ditetapkan tersebut malah seringkali tidak optimal atau tidak tercapai. Dilain pihak, upaya penggalian potensi PAD selama ini menunjukkan bahwa daerah masih mempunyai banyak keterbatasan dalam optimalisasi PAD.

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong yang meliputi batasan tujuan penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui proses penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Strategi yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Pasolong (2005) penelitian studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail. Penggunaan studi kasus disesuaikan dengan tipe-tipe pertanyaan seperti ”bagaimana” atau

”mengapa” dan diarahkan ke serangkaian peristiwa kontemporer, dimana peneliti hanya memiliki peluang kecil atau tidak sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut (Robet Yin, 2002. Dalam Studi Kasus Desain dan Metode).

Adapun jenis penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat itu (Pasolong, 2005). Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi berkaitan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mendeskripsikan proses dalam menentukan target PAD dan upaya pemerintah daerah dalam merealisasikannya, serta menjelaskan kenyataan atau temuan-temuan empiris secara lebih rinci terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi terhadap realisasi target PAD di Kota Sorong.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Sorong adalah daerah otonom yang menuntut kesiapan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya dalam menjalankan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan reliabel, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mengolah file-file atau dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, Renstra Kota Sorong Tahun 2009-2013, Kota Sorong Dalam Angka Tahun 2013, data target dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2009-2013, Jenis-jenis pajak dan retribusi daerah Kota Sorong, serta dokumen yang terkait lainnya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap responden penelitian untuk memperoleh data primer dan informasi yang lebih akurat guna melengkapi data sekunder mengenai hal yang berhubungan dengan pengolahan PAD, dalam proses penentuan target dan upaya pencapaiannya. Adapun responden dalam penelitian ini, antara lain :

1. Dari internal Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Sorong sebagai koordinator pelaksana pengelolaan PAD yang merencanakan, mendata, serta memungut komponen PAD, meliputi Kepala DPKD, Sekretaris DPKD, Kabid P3 (Program,

Penyuluhan, dan Pengawasan), Kabid PAD, Kasi Pajak, Kasi Retribusi, dan Kasi Lain-lain PAD yang Sah & hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

2. Pejabat pemerintahan yang turut berkaitan dengan dalam proses pengelolaan PAD, meliputi :

- Wali Kota Sorong selaku penanggung jawab anggaran.
- DPRD Komisi II Bagian Keuangan yang terlibat dalam pembahasan target PAD, dan pengawasan PAD.
- Sekretaris Daerah Kota Sorong selaku ketua tim intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan PBB.

Pemilihan informan tersebut disesuaikan dengan peranan dari tiap-tiap informan terpilih yang berkaitan langsung dengan proses pengelolaan PAD, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh data yang tepat terkait permasalahan penelitian.

c. Observasi (pengamatan)

Suatu cara pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objeknya mengenai pengaruh pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Sorong

Teknis Analisis Data

Dalam menjawab permasalahan penelitian, maka digunakan teknik analisis kualitatif yaitu analisis berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna Data yang disajikan bukan berupa angka-angka melainkan berupa kata-kata atau naratif. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dan studi dokumen yang telah dituangkan dalam catatan (Pasolong, 2005). Hasil pengumpulan data tersebut direduksi, kemudian hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*). kemudian dibuat kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD

Kontribusi yang dimaksud di sini adalah besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh sumber-sumber PAD terhadap besarnya jumlah PAD. Besarnya kontribusi juga dapat mencerminkan besarnya peran dari masing-masing sumber PAD tersebut. Gambaran mengenai kontribusi sumber-sumber PAD tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD Kota Sorong Tahun Anggaran 2003/2004 – 2013 (dalam proses)

Tahun Anggaran	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Dinas-dinas	Penerimaan Lain-lain
1	2	3	4	5	6
2003/2004	56,69	33,80	3,41	2,62	3,48
2004/2005	54,46	33,42	3,08	2,38	6,66
2005/2006	46,64	43,88	1,37	4,75	3,36
2006/2007	50,19	41,19	1,76	2,39	4,48
2007/2008	52,82	39,24	2,30	2,61	3,03
2008/2009	55,22	36,73	2,93	2,64	2,48
2009/2010	53,96	37,73	3,20	2,48	2,63
2010/2011	51,40	35,84	4,40	0,00	8,36
2011/2012	55,22	32,18	4,50	0,00	8,09
2013	53,56	31,74	8,58	0,00	6,12
Rata-rata	53,02	36,58	3,53	1,99	4,87

Berdasarkan tabel 1. tersebut terlihat bahwa yang paling besar perannya dalam menyumbang PAD sejak tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2013 adalah pajak daerah, dan seterusnya diikuti oleh retribusi daerah, penerimaan lain-lain, laba BUMD, dan terakhir adalah penerimaan dinas-dinas, masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 53,02 %, 36,58 %, 4,87 %, 3,53 %, dan 1,99 %.

Secara umum kontribusi sumber-sumber PAD tersebut dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Meskipun demikian secara absolut perolehan PAD khususnya dari pajak dan retribusi senantiasa mengalami kenaikan, kecuali pada tahun anggaran 2008/2009 dan tahun anggaran 2011.

Penurunan perolehan pajak dan retribusi pada tahun anggaran 2008/2009 disebabkan karena pengaruh pemberlakuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2007. Meskipun demikian dengan diberlakukannya undang-undang tersebut justru perolehan pajak dan retribusi menjadi lebih besar, yaitu pada tahun anggaran 2009/2011 dan tahun anggaran 2013 perolehannya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga penurunan yang terjadi pada tahun anggaran 2008/2009 hanya bersifat shock semata.

Kontribusi laba BUMD dan penerimaan lain-lain pada tahun anggaran 2009/2011 dan tahun anggaran 2013 memiliki nilai kontribusi yang cukup besar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk laba BUMD besarnya nilai kontribusi diikuti dengan nilai absolutnya. Kenaikan ini bisa disebabkan karena volume usaha dari BUMD tersebut meningkat, karena pada dasarnya jumlah BUMD yang dimiliki Pemerintah Kota Sorong masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan peningkatan yang terjadi pada penerimaan lain-lain disebabkan karena pos penerimaan dinas-dinas dihilangkan dan dialihkan pada pos penerimaan lain-lain.

Laju pertumbuhan PAD

Untuk mengetahui laju pertumbuhan PAD Kota Sorong menurut sumber-sumber penerimaannya selama periode analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pertumbuhan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2003/2004 – 2013

Sumber-sumber PAD	Absolut (000 Rp)		Proporsi (%)		Pertumbuhan Rata-rata	
	2001/2002	2011	21/22	2011	Absolut (000 Rp)	Prosentase
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Daerah	3.686.195	12.025.310	56,69	53,56	8.339.115	14,04
Retribusi Daerah	2.197.947	7.126.580	33,80	31,74	4.928.633	13,96
Laba BUMD	221.772	1.926.370	3,41	8,58	1.704.598	27,15
Pen. Dinas-dinas	170.339	-	2,62	-	- 170.339	-
Pen. Lain-lain	226.469	1.374.700	3,48	6,12	1.148.231	22,19
Jumlah	6.502.722	22.452.960	100,00	100,00	15.950.238	14,76

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kota Sorong

Berkaitan dengan kontribusi pada bahasan sebelumnya, maka pada tabel 2. terlihat bahwa proporsi pajak dan retribusi daerah mengalami penurunan. Sebaliknya proporsi laba BUMD dan penerimaan lain-lain mengalami peningkatan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa pos penerimaan dinas-dinas telah dihapus sejak tahun anggaran 2008/2009, maka proporsi penerimaan dinas-dinas pada tahun anggaran 2013 tidak ada (nihil). Dengan demikian apabila dibandingkan antara tahun anggaran 2001/2002 dengan tahun anggaran 2011, maka sebenarnya telah terjadi pergeseran proporsi, yaitu dari pajak dan retribusi daerah ke laba BUMD dan penerimaan lain-lain.

Selama periode pengamatan, PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,76 %. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari sumber-sumber PAD adalah laba BUMD sebesar 27,15 %, selanjutnya diikuti oleh penerimaan lain-lain sebesar 22,19 %, dan pajak daerah sebesar 14,04 %, serta pertumbuhan rata-rata terkecil adalah retribusi daerah sebesar 13,96 %.

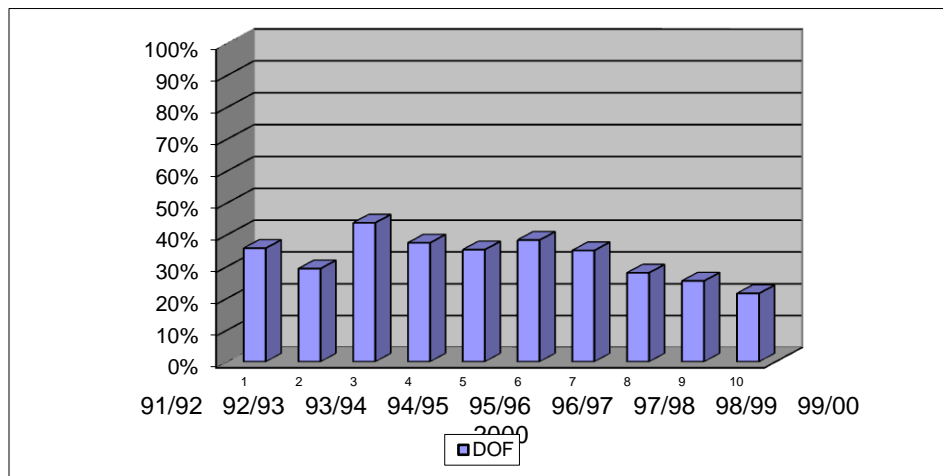
Kenyataan ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan rata-rata pajak dan retribusi daerah masih kurang memadai, karena masih di bawah laju pertumbuhan rata-rata PAD secara keseluruhan. Untuk laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang memiliki pertumbuhan rata-rata di atas pertumbuhan rata-rata PAD menunjukkan bahwa kedua sumber PAD ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan pada masa-masa yang akan datang, khususnya dalam upaya meningkatkan PAD.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam era otonomi akan memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu PAD diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan terbesar dari seluruh sumber penerimaan daerah, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi seminimal mungkin.

Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat berbanding terbalik dengan tingkat kemampuan dari daerah yang bersangkutan. Artinya adalah bahwa apabila suatu daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi maka dipastikan daerah tersebut mempunyai tingkat kemampuan daerah yang rendah.

Sebagai ukuran tingkat kemampuan daerah, maka digunakan ukuran yang disebut dengan Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Depdagri dan Fisipol UGM (2001) menyusun kriteria DOF, dengan kategori sebagai berikut :0,10% - 10,00% sangat kurang, 10,10 % - 20,00 % kurang, 20,10 % - 30,00 % sedang, 30,10 % - 40,00 % cukup, 40,10 % - 50,00 % baik, dan lebih dari 50 % sangat baik.



Gambar 1. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Nilai DOF tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2003/2004, yaitu sebesar 43,70 %. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran tersebut (lihat pada lampiran 2, diolah) terjadi penurunan secara drastis dari tahun sebelumnya pada pos penerimaan Sisa lebih perhitungan tahun lalu, Bagi hasil pajak-bukan pajak, dan Penerimaan pembangunan, yaitu dari Rp. 8.741.656.000,- menjadi Rp. 1.055.077.000,- (turun sebesar Rp. 7.686.579.000,- atau sekitar 87,93 %). Sebaliknya PAD mengalami kenaikan dari Rp. 7.948.501.000,- menjadi Rp. 10.246.384.000,- (naik sebesar Rp. 2.297.883.000,- atau hanya sekitar 28,91 %). Sementara itu nilai DOF terendah terjadi pada

tahun anggaran 2011. Hal ini juga disebabkan karena adanya perubahan porsi pada pos-pos penerimaan di dalam penerimaan daerah tersebut, yaitu adanya peningkatan yang sangat tajam pada pos Sisa lebih perhitungan tahun lalu, dari Rp. 7.043.394.000,- menjadi Rp. 21.474.330.000,- (naik sebesar Rp. 14.430.936.000,- atau sekitar 67,20 %). Sebaliknya PAD turun dari Rp. 24.790.128.000,- menjadi Rp. 22.452.960.000,- (turun sebesar Rp. 2.337.168.000,- atau sekitar 9,43 %).

Kemampuan Rutin Daerah (KRD)

Selain dengan mengukur tingkat kemampuan daerah, maka kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah perlu pula diukur tingkat kemampuan rutin daerahnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran daerah tersebut apakah mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemerintahan secara rutin dengan biaya yang berasal dari usaha daerah sendiri, yaitu PAD.

Lebih jauh yang dimaksud dengan kemampuan rutin daerah adalah rasio antara PAD dengan jumlah pengeluaran rutin daerah (di luar belanja pegawai). Belanja pegawai dalam pengukuran ini dikeluarkan karena sampai saat ini belanja pegawai masih berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui pos sumbangan dan bantuan pada penerimaan daerah (mulai tahun anggaran 2001 disalurkan melalui Dana Alokasi Umum). Kemampuan rutin daerah Kota Sorong selama kurun waktu tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Kemampuan Rutin Daerah (KRD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2003/2004 - 2013 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Pengeluaran Rutin	Realisasi PAD	KRD (%)
1	2	3	4
2003/2004	4.471.365	6.542.722	145,43
2004/2005	5.892.883	7.948.501	134,88
2005/2006	7.599.416	10.246.384	134,83
2006/2007	9.887.737	12.549.223	126,92
2007/2008	11.862.816	14.376.066	121,19
2008/2009	16.610.727	17.770.957	106,98
2009/2010	18.051.977	19.154.650	101,20
2010/2011	18.928.092	19.972.896	105,52
2011/2012	24.035.254	24.790.128	103,14
2013	20.153.850	22.452.950	111,41
Rata-rata			119,15

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kota Sorong

Dari tabel 3. nampak bahwa rata-rata kemampuan rutin daerah sebesar 119,15 %, dan dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2007/2008 secara gradual kemampuan rutin daerah Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena besarnya kenaikan PAD dari tahun ke tahun masih lebih kecil dibandingkan dengan besarnya kenaikan pengeluaran rutinnya.

Kinerja administrasi penerimaan PAD

Untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan PAD menggunakan ukuran tingkat efektifitas dan efisiensi. Tingkat efektifitas diukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dalam setahun dengan potensi PAD. Dengan asumsi bahwa penghitungan potensi PAD belum dilakukan (belum ada), maka digunakan data target PAD sebagai *proxynya*. Dengan perhitungan tersebut, maka angka yang diperoleh akan memiliki makna bahwa semakin kecil angka efektifitasnya berarti semakin tidak efektif. Sebaliknya semakin besar angka efektifitasnya berarti semakin efektif, yang menggambarkan semakin baik kinerja administrasi penerimaan PAD-nya. Lebih lanjut hasil perhitungan efektifitas dapat dilihat dalam tabel 4.

Efektif tidaknya penerimaan PAD Kota Yogyakarta dapat diketahui dengan membandingkan nilai efektifitas yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan Depdagri, yaitu : 40,10 % - 60,00 % berarti tidak efektif, 60,10 % - 80,00 % berarti cukup efektif, 80,10 % - 100,00 % berarti efektif, dan lebih dari 100,00 % sangat efektif.

Tabel 4. Tingkat efektifitas pengumpulan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2003/2004 – 2013 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi PAD	Efektifitas (%)
1	2	3	4
2003/2004	6.298.138	6.542.722	103,88
2004/2005	8.198.946	7.948.501	96,95
2005/2006	11.214.100	10.246.384	91,37
2006/2007	11.923.024	12.549.223	105,25
2007/2008	13.793.031	14.376.066	104,27
2008/2009	17.392.303	17.770.957	102,18
2009/2010	18.792.033	19.154.650	101,93
2010/2011	18.931.756	19.972.896	105,50
2011/2012	23.349.604	24.790.128	106,17
2013	20.657.046	22.452.950	108,69
Rata-rata			102,62

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kota Sorong

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui nilai rata-rata efektifitas penerimaan PAD, yaitu sebesar 102,62 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum upaya pelaksanaan administrasi penerimaan

PAD Kota Sorong sudah sangat efektif. Namun demikian pada tahun anggaran 2003/2004 dan 2003/2004 hanya mencapai kategori efektif saja.

Sementara itu tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan PAD selama setahun dengan realisasi PAD. Biaya yang dikeluarkan atau biaya pengumpulan PAD adalah seluruh biaya rutin Dinas Pendapatan Daerah, karena instansi inilah yang bertugas mengumpulkan seluruh PAD. Dengan menghitung tingkat efisiensi, maka dapat diketahui semakin kecil angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin efisien. Sebaliknya semakin besar angka efisiensi yang diperoleh berarti semakin tidak efisien. Tingkat efisiensi penerimaan PAD Kota Sorong selama tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2013 dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5. Tingkat efisiensi pengumpulan Pendapatan Asli Daerah Kota Sorong Tahun Anggaran 2003/2004 – 2013 (dalam ribuan rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Biaya Pengumpulan	Efisiensi (%)
1	2	3	4
2003/2004	6.542.722	1.155.346	17,66
2004/2005	7.948.501	1.345.525	16,93
2005/2006	10.246.384	1.502.326	14,66
2006/2007	12.549.223	1.913.169	15,25
2007/2008	14.376.066	2.357.484	16,40
2008/2009	17.770.957	3.017.927	16,98
2009/2010	19.154.650	3.294.590	17,20
2010/2011	19.972.896	3.235.739	16,20
2011/2012	24.790.128	3.944.413	15,91
2013	22.452.950	3.541.363	15,77
Rata-rata			16,30

Sumber : Bagian Keuangan, Buku Perhitungan APBD Kota Sorong

Berdasarkan tabel 5. terlihat bahwa angka efisiensi yang dicapai rata-rata adalah sebesar 16,30 %. Artinya adalah bahwa hanya sekitar 16,30 % dari penerimaan PAD yang digunakan untuk membiayai

KESIMPULAN

1. Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD menggambarkan besar/kecilnya peran atau sumbangsih yang diberikan oleh sumber-sumber PAD tersebut terhadap total PAD. Selama periode analisis dari tahun anggaran 2001/2002 sampai dengan tahun anggaran 2011, pajak dan

retribusi daerah sangat mendominasi perolehan PAD. Rata-rata kontribusi yang disumbangkan adalah masing-masing sebesar 53,02 %, dan 36,58 %. Artinya dari kedua sumber PAD tersebut diperoleh sebesar 89,60 %.

Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 ternyata tidak membawa pengaruh yang berarti, karena turunnya perolehan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran 2008/2009 hanya bersifat *shock* semata. Mengingat pada tahun anggaran 2009/2010 dan tahun anggaran 2011 justru perolehan PAD naik kembali melebihi perolehan pada tahun anggaran 2007/2008.

Sejak tahun anggaran 2008/2009 penerimaan dinas-dinas tidak dimasukkan kembali dalam sumber-sumber PAD, sehingga kontribusi penerimaan lain-lain pada tahun terakhir meningkat cukup tinggi.

Laba BUMD dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup berarti terhitung sejak tahun anggaran 2005/2006 sampai tahun anggaran 2011. Bahkan pada tahun anggaran 2011 kontribusi perolehannya hampir mencapai dua kali perolehan tahun anggaran sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang disusun Depdagri – Fisipol UGM, maka Derajat Otonomi Fiskal Kota Sorong yang menggambarkan kemampuan daerah tersebut berada pada kategori “cukup”. Artinya adalah bahwa Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara otonom.

2. Kemampuan rutin daerah Kota Sorong rata-rata sebesar 119,15 %. Artinya adalah bahwa setiap Rp100,- pengeluaran rutin yang harus ditanggung daerah dapat ditanggulangi dengan PAD yang dimiliki, yaitu sebesar Rp119,15,-, atau dengan kata lain PAD yang dimiliki masih lebih besar dari belanja rutin yang harus dikeluarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sorong memiliki kemampuan yang baik dalam membiayai keperluan rutin pemerintahan, mengingat pembiayaan untuk belanja pegawai masih menjadi tanggungan Pemerintah Pusat. Namun demikian apabila belanja pegawai sebagai bagian dari pengeluaran rutin ditanggung oleh Pemerintah Daerah sendiri, maka sudah tentu kemampuan rutin daerahnya menjadi rendah sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Bird, Richard M. dan Vaillancourt, Francois, 2000, *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. *Kota Sorong Dalam Angka 2004*. Kota Sorong

_____. 2006. *Kota Sorong Dalam Angka 2005*. Kota Sorong

- _____. 2007. *Kota Sorong Dalam Angka 2006*. Kota Sorong
- _____. 2008. *Kota Sorong Dalam Angka 2007*. Kota Sorong
- Damhuri, Fitrianita. 2001. *Strategi Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Dalam Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.
- Devas, Nick, dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press, Jakarta
- Fathillah, Gina Sy. 2001. *Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten kutai kalimantan timur*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.
- Gaffar, Afan, dkk. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Insukindro, dkk. 1994. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli daerah*. Laporan Penelitian, KKD, FE-UGM, Yogyakarta.
- Januari. 2002. *Beberapa Faktor Penyebab Ketidakefektifan Pemungutan Retribusi Pasar sebagai Salah Satu Sumber PAD*. Tesis tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana UNHAS.
- Jaya, Wihana Kirana. 1999. *Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro*. PPPEB UGM-Yogyakarta.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kakisina, Stephen, dan Rumansara Agustinus. 2000. *Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahan Sebagai Demokrasi Politik dan Eonomi Berkeadilan, Kritis*, Vol.XII No.3. 54-77.
- Kasjwar, Nusirwan. 2001. *Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Sebagai salah Satu Sumber Penerimaan APBD Propinsi Kalimantan Timur*. Tesis tidak dipublikasikan, Pascasarjana, UNHAS.
- Mahi, Raksaka. 2000. *Prospek Desentralisasi di Indonesia Ditinjau dari Segi Pemerataan Antar Daerah dan Peningkatan Efisiensi*, Analisis CSIS, No. 1, 54–66.
- Mardiasmo. 2000. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah 2001*. makalah disampaikan pada Seminar HIMMEP, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- _____. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Mindarti, Lely, Indah. 2007. *Transfer Dana Pusat, Mobilisasi PAD, dan Demokrasi Lokal*, Artikel. Unibraw, Malang.

- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhajir, N. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muhammad, H. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda*. Tesis tidak dipublikasikan, Pascasarjana, UNHAS.
- Pasolong, H., 2005. *Metode Penelitian Administrasi Untuk Organisasi Profit dan Non-Profit*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas), Makassar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*
- Permendagri No. 32 Tahun 2008 *tentang Pedoman Penyusunan APBD 2010*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 *Tentang Pengelolaan keuangan daerah*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 *tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah*.
- Sanusi, Agus. 2002. *Evaluasi kemampuan keuangan daerah Provinsi jambi*. Tesis Tidak Dipublikasikan, Program Pascasarjana, UGM.
- Saragih, P.J. 1996. *Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan*, Nomor 6, 36 – 43.
- Soemarso, S. R. 2007. *Perpajakan, Pendekatan Komprehensif*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tjahjanulin Domai. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah, Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (pdf). fakultas ilmu administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Wayong, J. 1975. *Administrasi Keuangan Daerah*. Penerbit Ikhtiar, Jakarta.
- Widayat, Wahyu. 1994. *Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen STIE – YKPN*, Yogyakarta, Vol VI, 23 –47.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.